



TAK TERTIB: Abang becak yang seenaknya sendiri melawan arus (dari selatan ke utara) di Jalan Malioboro, kemarin. IBNU TAUFIK/RADAR JOGJA

Malioboro (Mulai) Turun Kelas

**Jika Dibiarkan,
Tak Menarik Lagi**

JOGJA - Kawasan Malioboro yang menjadi ikon Kota Jogja saat ini dinilai sudah turun kelas. Kawasan legendaris itu akan semakin tidak menarik lagi

jika sejak sekarang tidak mulai ditata kembali. Label Malioboro yang mulai tidak bersih, tidak nyaman dan tidak aman harus mulai dihilangkan sejak saat ini oleh semua stakeholder dan shareholder yang ada.

Ipung Purwandani, Ketua RW II Sosrowijayan Timur mengungkap-

kan, kondisi ini bisa terjadi lantaran tidak adanya ketegasan dari aparat, dalam hal ini Pemkot Jogja. Pelanggar kebersihan, baik dari PKL, pemilik toko, maupun masyarakat lain sejauh ini tidak mendapatkan sanksi apapun ❁

► Baca **Malioboro...** Hal 13

Usulkan Ada Badan Otorita Khusus

■ MALIOBORO

Sambungan dari hal 3

Demikian juga pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna lalu lintas. "Becak misalnya. Kan becak hanya boleh ke arah selatan. Tapi kenyataannya banyak yang nekat berjalan ke arah berlawanan," katanya kemarin.

Karena itulah, dia meminta agar ada sanksi tegas bagi para pelanggarnya. Dengan begitu, akan muncul kesadaran kewajiban untuk menjaga kebersihan, kenyamanan dan ketertiban terhadap Malioboro ini.

Soal kekumuhan dan kekurangnyamanan juga diakui Yati. Anggota P2KM (PKK-nya Malioboro) ini mengakui jika saat ini kondisi kawasan Malioboro memang mulai kumuh dan tidak

nyaman. Para pedagang PKL juga mulai merasakan kekurangnyamanannya melakukan aktivitas ekonominya.

Kekurangnyamanan ini, kata Yati, salah satunya juga akibat semakin banyaknya gelandangan dan pengemis (gepeng) yang beroperasi di sepanjang Malioboro. Tak jarang, keberadaan mereka ini justru mengganggu kenyamanan para pedagang, bahkan para wisatawan. "Jogja seperti ini sudah menjadi kotanya pengemis," lanjutnya.

Kekumuhan yang ada di Malioboro saat ini, terang Yati, juga akibat mulai rusaknya tenda-tenda bantuan pemerintah yang diberikan beberapa tahun lalu. Seiring perjalanan waktu, tenda-tenda itu banyak yang rusak. Sebagai alternatifnya, para pedagang kemudian memakai atap plastik.

Akibatnya, kini tidak banyak lagi keseragaman tenda. "Nah, kami minta agar Pemkot Jogja mau mengganti tenda-tenda ini dengan yang baru," pintanya.

Usulan lain disampaikan Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Suryadi Suryadinata. Dia mengusulkan adanya otoritas khusus yang menangani kawasan Malioboro. Badan otoritas khusus inilah yang nantinya diharapkan bisa "memanej" kawasan Malioboro. Dengan begitu, jika ada persoalan dan segala hal tentang Malioboro, cukup badan otoritas ini yang turun tangan dan tidak perlu ke Pemkot Jogja.

Pengusaha Tionghoa ini juga sepakat, jika rencana menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian benar-benar segera diwujudkan. Hanya saja, ia meng-

ingatkan, sebelum rencana itu benar-benar diwujudkan, harus disiapkan dulu infrastruktur dan kesiapan nonfisik lainnya. "Misalnya kesiapan lahan parkir yang memadai, ketertiban, kenyamanan dan keamanannya juga harus dijamin," tandasnya.

Soal kekumuhan, Suryadi mengakui jika hal itu terjadi bukan saja akibat ulah PKL maupun warga, bahkan pengunjung. Melainkan juga akibat kontribusi dari para pemilik toko yang ada di sepanjang Jalan Malioboro. Kondisi ini, bisa terjadi karena armada pengangkut sampah yang kurang disiplin dalam mengambil sampah.

"Kami usul agar kendaraan pengangkut sampah punya tanda bunyi khusus, sehingga kami tahu ada mobil sampah yang lewat," usulnya. (din)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemukiman dan Prasarana			
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per			
4. Badan Perencanaan Pembangunan			
5. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005